



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 30 Juni 2021

Halaman: 1

► PENANGANAN PANDEMI

Zona Merah Mestinya Menutup Objek Wisata

Ujang Hasanudin, Abdul Hamid Rizaik, & David Kurniawan
rdaksi@harianjogja.com

JOGJA—Dinas Pariwisata DIY bersama Dinas Pariwisata di kabupaten dan kota tengah mengkaji untuk menutup sejumlah objek wisata demi menekan angka peningkatan kasus Covid-19 di DIY yang terjadi beberapa hari terakhir ini.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo mengatakan penutupan objek wisata diperlukan setidaknya di objek wisata di zona merah. Sementara penentuan zonasi risiko penularan Covid-19 saat ini ada dua versi, yakni versi epidemiologi dan versi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang ditentukan oleh masing-masing kepala daerah.

Mengacu hasil kajian epidemiologi, zonasi merah di DIY ada di tiga kabupaten dan satu kota, yakni Bantul, Sleman, Gunungkidul, dan Jogja, sedangkan Kulonprogo masuk dalam zona oranye.

Adapun menurut Instruksi Gubernur DIY No.16/2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, pelaksanaan kegiatan di area publik seperti fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya, ditutup sementara waktu sampai wilayah tersebut tidak lagi dinyatakan zona merah.

Zona Merah...

"Dalam Instruksi Mendagri maupun Instruksi Gubernur DIY, penetapan zonasi ditentukan pemerintah daerah setempat. Sementara pemerintah kabupaten dan kota belum berani menentukan sikap," kata Singgih, Selasa (29/6).

Meski belum ada penetapan penutupan wisata secara resmi, sudah banyak objek wisata yang tutup secara mandiri maupun berdasarkan keputusan kepala daerah masing-masing. Misalnya, di Bantul semua objek wisata yang dikelola pemerintah ditutup selama dua hari setiap Sabtu dan Minggu. "Sementara kondisinya seperti itu, kami masih koordinasi sama-sama rumuskan hal tersebut [penentuan zonasi risiko penularan Covid-19]," ujar Singgih.

Selain menutup objek wisata, Singgih mengaku pemerintah sudah menunda sejumlah event atau kegiatan wisata, di antaranya festival Perahu Naga yang rencananya dilakukan Juni ini di Laguna Pantai Depok. Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardianto Setyo Aji, sudah menyampaikan kepada pemerintah agar bisa menjaga kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Menurut dia, kuncinya adalah ketegasan dalam penerapan PPKM Mikro untuk menekan penularan Covid-19.

GIPI lebih memilih anggotanya diberikan sanksi ketimbang wisata ditutup. "Misalnya dari anggota kami tak sesuai proses kami menerima sanksi dibanding sama sekali tak bisa digerakkan usaha ini," ujar Bobby.

Sementara itu, Pemkab Gunungkidul kembali menerapkan kebijakan bagi wisatawan luar daerah untuk membawa surat bebas Covid-19. Hal ini tertuang dalam Instruksi Bupati No.443/2707 mengenai Perpanjangan PPKM Mikro. Bupati Gunungkidul Sunaryanto menerangkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan virus Corona menetapkan kebijakan surat bebas Covid-19 bagi wisatawan dari luar daerah. Surat bebas ini bisa ditunjukkan dengan adanya hasil tes *antigen* negatif.

Selain itu, ada juga pembatasan pengunjung sebanyak 25% dari kapasitas normal. Jam operasional wisata juga dibatasi hanya sampai pukul 18.00 WIB. Adapun penutupan wisata akan mengacu pada peta zonasi kerawanan penularan.

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Sukmono mengaku sudah menindaklanjuti dengan membuat edaran yang diberikan ke pelaku usaha wisata di Bumi Handayani. "Mulai hari ini [kemarin] kami edarkan ke pelaku-pelaku wisata untuk diterapkan," katanya. Menurut dia, kewajiban membawa surat bebas Covid-19 bukan hal baru. Pasalnya, kebijakan ini juga sudah diberlakukan di Januari lalu.

Dukungan Masyarakat

Sementara itu, *Gerakan Seminggu di Rumah Saja* yang dicanangkan Pemkab Sleman sejak 28 Juni, tidak akan memiliki efek jika tidak mendapatkan dukungan semua pihak.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Sleman Shavitri Nurmala Dewi

AWAS CORONA!

☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

► Halaman 11

mengatakan gerakan *Sesarengan Jogo Slemari* merupakan wujud perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat.

Tujuannya, kata Evi, agar masyarakat dapat terhindar dan tidak terpapar virus Corona.

"Ini langkah yang harus diambil mengingat angka penularan di Sleman akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. *Sesarengan Jogo Slemari* itu untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar Covid-19," kata Evi.

Adapun, Pemkab Bantul belum akan mengikuti langkah dari Pemkab Sleman yang mengimbau masyarakat untuk berdiam diri di rumah selama sepekan. "Bantul belum tetapkan di rumah saja. Ya, karena aktivitas ekonomi harus terus berlangsung," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Selasa.

Selain aktivitas ekonomi, Halim memastikan sampai saat ini kegiatan belajar mengajar di Bantul masih dilakukan secara daring. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sedang menggodok aturan soal imbauan warga untuk berada di rumah selama kurun waktu tertentu. Aturan tersebut menyusul meningkatnya kasus positif Covid-19 di Bumi Menoreh.

Wakil Bupati Kulonprogo, Fajar Gegana, mengatakan aturan tersebut memungkinkan untuk dikeluarkan karena kasus positif Covid-19 meningkat cukup signifikan dalam sepekan terakhir.

"Aturan tersebut masih dalam proses [penyusunan] draf di bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Kulonprogo," kata Fajar. (Jumali & Hafit Yudi Suproba)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. Sat Pol PP 4. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005